

# KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Muhammad Reza Irfandy<sup>1</sup>, Imam Nazarudin Latif<sup>2</sup>, Rina Masithoh H<sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email : [rezha\\_150192@yahoo.com](mailto:rezha_150192@yahoo.com)

---

## **Keywords :**

*Contribution, Effectiveness, Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Fee, Regional Original Revenue*

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze and determine the level of contribution and effectiveness of PKB and BBNKB UPTD PPRD Bapenda East Kalimantan Province, especially the Kutai Kartanegara Region in 2016-2020 on PAD Kaltim.*

*The analytical tool used in this research is the contribution ratio and the effectiveness ratio. The results of this study show that the contribution of PKB and BBNKB in 2016 - 2020 has a decreasing value, on the contrary the effectiveness of PKB and BBNKB has a very effective value which tends to increase in the collection of PKB and BBNKB. Although there are still many obstacles faced, namely the lack of public awareness to pay taxes on time which results in many taxpayers being in arrears.*

*The results in this study indicate that the level of contribution of BBNKB and PKB in increasing local revenue from 2016-2020 is very less due to the contribution ratio of BBNKB 2.01% and PKB 2.16%. And the level of effectiveness of BBNKB and PKB in 2016-2020 is very Effective, it is shown that from the average the effectiveness ratio of BBNKB is 112.66% and PKB is 107.87%*

---

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak. Berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat menjadi PKB, merupakan pajak atas

kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor, yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang beroda beserta gandengannya dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menurut Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menjelaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan BBN-KB adalah pajak yang dikenakan sebagai akibat yang terjadi dari perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena transaksi jual beli, warisan, tukar menukar, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha atas penyerahan atau penggantian hak milik kendaraan bermotor. Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Subjek Pajak BBN-KB adalah orang pribadi, badan, atau instansi pemerintah yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang kompeten, dimana dapat memberikan sumbangsih yang tinggi kepada daerah. Semakin meningkatnya volume kendaraan bermotor khususnya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Wajib pajak akan merasa puas jika pelayanan yang diterima sudah sesuai dengan harapan. Kepuasan para wajib pajak merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan aparat pajak. Wajib pajak dalam membayar pajaknya tidak mempunyai kontra prestasi yang langsung, maka kualitas pelayanan yang baik harus diberikan oleh seluruh instansi pemerintah kepada mereka. Jika wajib pajak merasa puas akan hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pungutan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat memberikan kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu, *contribute*, *contribution* yang artinya adalah keterlibatan, keikutsertaan, melibatkan diri, sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi ataupun tindakan, dengan adanya kontribusi maka individu tersebut telah berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hidupnya menurut Abdul Halim (2014). Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan pengukuran efektivitas (Abdul Halim, 2014) terhadap pendapatan asli daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik data digunakan yaitu data sekunder yang merupakan hasil penelitian kepustakaan (*Library research*) yang mana data tersebut diperoleh dari laporan tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

### Alat Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teori – teori dan data – data yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisis data pertama yang digunakan untuk mengetahui kontribusi dan efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### 1. Kontribusi

Menurut Abdul Halim (2014), untuk mengetahui kontribusi dari pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PKB Terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi BBNKB Terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BBNKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 1. Rasio Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

(Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327)

#### 2. Efektivitas

Pengukuran efektivitas (Abdul Halim, 2014)

$$\text{Efektivitas Penerimaan PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Penerimaan BBNKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BBNKB}}{\text{Target Penerimaan BBNKB}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas menurut Halim tersebut, apabila yang dicapai minimal satu atau 100%, maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif penerimaan tersebut. Sebaliknya, semakin kecil persentasenya, maka menunjukkan penerimaan tersebut semakin tidak efektif. Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria pada tabel 2

**Tabel 2 Rasio Efektifitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

(Sumber: Beni Pekei, 2016)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Kontribusi

**Tabel 3 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 2016 s/d 2020**

Tahun	Realisasi PKB (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	Persentase (%)	Keterangan
1	2	3	4= ((3:2) x 100%)	5 = (Rasio Kontribusi)
2016	102.456.659.233	4.029.364.843.886	2,54	Sangat Kurang
2017	96.387.712.301	4.588.753.158.018	2,10	Sangat Kurang
2018	109.545.349.134	5.802.442.683.946	1,89	Sangat Kurang
2019	131.594.014.690	6.555.853.195.408	2,01	Sangat Kurang
2020	120.281.215.017	5.289.093.692.765	2,27	Sangat Kurang
Rata-rata			2,16	Sangat Kurang

(Sumber: diolah peneliti 2022)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kaltim Wilayah Kukar dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Kontribusi yang kecil atau kurang dari 10% menunjukkan bahwa upaya UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kaltim Wilayah Kukar dalam menggali sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan oleh realisasi dari Pajak Kendaraan Bermotor menurun sedangkan target pendapatan asli daerah meningkat. Selain itu pengawasan oleh Badan Pendapatan Daerah yang hanya bertumpu pada laporan-laporan per tahun saja, oleh karena itu kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah masih tergolong kecil.

Pemerintah dituntut kemandiriannya untuk menangani segala urusan, baik untuk pembangunan di daerah maupun penyelenggaraan pemerintah daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa pemerintah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan mengali potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor yang dianggap potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor dalam beberapa tahun ini belum menampakkan target maksimal yang ditetapkan daerah. Hal ini dikarenakan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor seperti kurangnya sosialisasi tentang peraturan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor kepada masyarakat sehingga membuat kesadaran masyarakat kurang terhadap peraturan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, ketidakjujuran masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kemudian harus ada terobosan baru yang dilaksanakan SKPD yang melaksanakan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor karena harus dipahami jika PAD adalah penyeimbang program yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan harus dipahami bahwa pendapatan yang dicapai menunjukkan kinerja yang dilakukan, jika bertahun-tahun Pajak Kendaraan Bermotor tidak tercapai, maka harus ada evaluasi yang dilakukan agar Pajak Kendaraan Bermotor dapat mencapai target dengan interval

diatas 50%.

**Tabel 4 Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 2016 s/d 2020**

Tahun	Realisasi BBNKB (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	Persentase (%)	Keterangan
1	2	3	4= ((3:2) x 100%)	5 = (Rasio Kontribusi)
2016	79.286.350.500	4.029.364.843.886	1,97	Sangat Kurang
2017	75.110.100.500	4.588.753.158.018	1,64	Sangat Kurang
2018	123.327.851.793	5.802.442.683.946	2,13	Sangat Kurang
2019	146.034.713.000	6.555.853.195.408	2,23	Sangat Kurang
2020	110.361.300.000	5.289.093.692.765	2,09	Sangat Kurang
Rata-rata			2,01	Sangat Kurang

(Sumber: diolah peneliti 2022)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kaltim Wilayah Kukar dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Kontribusi yang kecil atau kurang dari 10% menunjukkan bahwa upaya UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kaltim Wilayah Kukar dalam menggali sumber penerimaan daerah yang berasal dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan oleh realisasi dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurun sedangkan target pendapatan asli daerah meningkat. Selain itu pengawasan oleh Badan Pendapatan Daerah yang hanya bertumpu pada laporan-laporan per tahun saja, oleh karena itu kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah masih tergolong kecil.

Pemerintah dituntut kemandiriannya untuk menangani segala urusan, baik untuk pembangunan di daerah maupun penyelenggaraan pemerintah daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa pemerintah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya berasal dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dianggap potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam beberapa tahun ini belum menampakkan target maksimal yang ditetapkan daerah. Hal ini dikarenakan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor seperti kurangnya sosialisasi tentang peraturan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada masyarakat sehingga membuat kesadaran masyarakat kurang terhadap peraturan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ketidakjujuran masyarakat dalam pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kemudian harus ada terobosan baru yang dilaksanakan SKPD yang melaksanakan pengelolaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena harus dipahami jika PAD adalah penyeimbang program yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan harus dipahami bahwa pendapatan yang dicapai menunjukkan kinerja yang dilakukan, jika bertahun-tahun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak tercapai, maka harus ada evaluasi yang dilakukan agar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat mencapai target dengan interval diatas 50%.

## 2. Efektivitas

**Tabel 5 Realisasi Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 s/d 2020**

Tahun	Realisasi PKB (Rp.)	Target Penerimaan (Rp.)	Persentase (%)	Keterangan
1	2	3	4= ((3:2) x 100%)	5 = (Rasio Efektifitas)
2016	102.456.659.233	95.000.000.000	107,85	Sangat Efektif
2017	96.387.712.301	103.000.000.000	93,58	Sangat Efektif
2018	109.545.349.134	104.500.000.000	104,83	Sangat Efektif
2019	131.594.014.690	110.000.000.000	119,63	Sangat Efektif
2020	120.281.215.017	106.000.000.000	113,47	Sangat Efektif
Rata-rata			107,87	Sangat Efektif

(Sumber: diolah peneliti 2022)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat pada tabel bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kaltim Wilayah Kuka selama 5 tahun yaitu dari 2016-2017 dikatakan stabil, hal ini terjadi dikarenakan peningkatan penerimaan tiap tahun mengalami peningkatan dan target penerimaan tiap tahun juga mengalami peningkatan.

**Tabel 5. 1 Realisasi Efektivitas Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 s/d 2020**

Tahun	Realisasi BBNKB (Rp.)	Target Penerimaan (Rp.)	Persentase (%)	Keterangan
1	2	3	4= ((3:2) x 100%)	5 = (Rasio Efektifitas)
2016	79.286.350.500	78.000.000.000	101,65	Sangat Efektif
2017	75.110.100.500	70.000.000.000	107,30	Sangat Efektif
2018	123.327.851.793	100.000.000.000	123,33	Sangat Efektif
2019	146.034.713.000	130.000.000.000	112,33	Sangat Efektif
2020	110.361.300.000	93.000.000.000	118,67	Sangat Efektif
Rata-rata			112,66	Sangat Efektif

(Sumber: diolah peneliti 2022)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat pada tabel bahwa tingkat efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kaltim Wilayah Kukar selama 5 tahun yaitu dari 2016-2017 dikatakan stabil, hal ini terjadi dikarenakan peningkatan penerimaan tiap tahun mengalami peningkatan dan target penerimaan tiap tahun juga mengalami peningkatan.

## Pembahasan

### A. Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil perhitungan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan asli daerah pada tahun 2016 bisa dilihat pada tabel 5.1 yang diperoleh sebesar 2,54%. Pada tahun 2017 kontribusi turun pada nilai 2,10 % yang berarti mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 0,44%, terjadi penurunan karena pada tahun 2017 Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 4.588.753.158.018 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp 96.387.712.301 Pada tahun 2018 kontribusi turun pada nilai 1,89 % yang berarti mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar

0,21%, terjadi penurunan karena pada tahun 2018 Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 5.802.442.683.946 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami Peningkatan sebesar Rp 109.545.349.134 Pada tahun 2019 kontribusi naik pada nilai 2,01 % yang berarti mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 0,12%, terjadi kenaikan karena pada tahun 2019 Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 6.555.853.195.408 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp 131.594.014.690 Pada tahun 2020 kontribusi naik pada nilai 2,27 % yang berarti mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 0,26%, terjadi kenaikan karena pada tahun 2020 Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 5.289.093.692.765 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp 120.281.215.017

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kutai Kartanegara pada periode tahun 2016 - 2020 ditinjau dari rasio kontribusi menunjukkan pada nilai rasio yang sangat kurang. Menurut Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327, standar rasio yang umumnya dipakai sekitar diatas 50%. Nilai kontribusi yang ditunjukkan pada tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan dan penurunan atau bisa dikatakan berfluktuasi, penurunan yang diakibatkan dari mutasi kendaraan bermotor keluar daerah sedangkan kenaikan diakibatkan dari daya beli kendaraan bermotor masyarakat yang meningkat tiap tahunnya, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kutai Kartanegara pada periode tahun 2016 - 2020 ditinjau dari Rasio kontribusi tidak mengalami pertumbuhan, maka hipotesis diterima.

Dari hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Djago (2015) dengan hasil perhitungan analisis kontribusi PKB periode 2009-2013 yang di lakukan di UPTD Surabaya Utara, memberikan kontribusi kisaran antara 40% hingga 60% dari total PAD. Selama 5 tahun terakhir PKB di UPTD Surabaya Utara mengalami kenaikan upaya yang dilakukan untuk peningkatan pendapatan dari sektor PKB adalah tingkat validitas pengiriman Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (SPKPKB) harus dapat dicapai, hal ini dikarenakan bahwa Pengiriman SPKPKB ini merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan jumlah tunggakan kendaraan bermotor. dan penurunan namun tidak signifikan, susah menemukan rumah wajib pajak. Pada waktu petugas pajak mendatangi nama dan alamat yang tertera dalam surat ternyata wajib pajak tersebut hanya atas nama saja, karena namanya dipinjam oleh orang lain untuk menghindari pajak progresif. Banyak kendaraan yang telah dijual kepada pihak lain, tetapi tidak dilaporkan. Para petugas dinas luar dalam memberikan laporan status kendaraan bermotor banyak yang tidak valid, dalam arti bahwa kendaraan yang seharusnya sudah dijual tetapi masih distatus dimilikidan dapat mencapai target yang telah ditentukan.

#### B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Hasil perhitungan kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan asli daerah pada tahun 2016 bisa dilihat pada tabel 5.2 yang diperoleh sebesar 1,97%. Pada tahun 2017 kontribusi turun pada nilai 1,64 % yang berarti mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 0,33%, terjadi penurunan karena pada tahun 2017 Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 4.588.753.158.018 Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp 79.286.350.500 Pada tahun 2018 kontribusi naik pada nilai 2,13 % yang berarti mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 0,49%, terjadi kenaikan karena pada tahun 2018 Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 5.802.442.683.946 Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami Peningkatan sebesar Rp 123.327.851.793 Pada tahun 2019 kontribusi naik pada nilai 2,23 % yang berarti mengalami kenaikan dari tahun 2018

sebesar 0,1%, terjadi kenaikan karena pada tahun 2019 Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 6.555.853.195.408 Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp 146.034.713.000 Pada tahun 2020 kontribusi turun pada nilai 2,09 % yang berarti mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 0,14%, terjadi penurunan karena pada tahun 2020 Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 5.289.093.692.765 Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp 110.361.300.000

Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kutai Kartanegara pada periode tahun 2016 - 2020 ditinjau dari rasio kontribusi menunjukkan pada nilai rasio yang sangat kurang. Menurut Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327, standar rasio yang umumnya dipakai sekitar diatas 50%. Nilai kontribusi yang ditunjukkan pada tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan dan penurunan atau bisa dikatakan berfluktuasi, penurunan yang diakibatkan dari mutasi kendaraan bermotor keluar daerah sedangkan kenaikan diakibatkan dari daya beli kendaraan bermotor masyarakat yang meningkat tiap tahunnya, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kutai Kartanegara pada periode tahun 2016 - 2020 ditinjau dari Rasio kontribusi tidak mengalami pertumbuhan, maka hipotesis diterima.

Dari hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Djago (2015) dengan hasil perhitungan analisis kontribusi PKB periode 2009-2013 yang di lakukan di UPTD Surabaya Utara, memberikan kontribusi kisaran antara 40% hingga 60% dari total PAD. Selama 5 tahun terakhir BBNKB di UPTD Surabaya Utara mengalami kenaikan upaya yang dilakukan untuk peningkatan pendapatan dari sektor BBNKB adalah tingkat validitas pengiriman Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (SPKPKB) harus dapat dicapai, hal ini dikarenakan bahwa Pengiriman SPKPKB ini merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan jumlah tunggakan kendaraan bermotor. dan penurunan namun tidak signifikan, susahny menemukan rumah wajib pajak. Pada waktu petugas pajak mendatangi nama dan alamat yang tertera dalam surat ternyata wajib pajak tersebut hanya atas nama saja, karena namanya dipinjam oleh orang lain untuk menghindari pajak progresif. Banyak kendaraan yang telah dijual kepada pihak lain, tetapi tidak dilaporkan. Para petugas dinas luar dalam memberikan laporan status kendaraan bermotor banyak yang tidak valid, dalam arti bahwa kendaraan yang seharusnya sudah dijual tetapi masih distatus dimiliki dan dapat mencapai target yang telah ditentukan.

## **Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas**

### **A. Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil perhitungan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan asli daerah pada tahun 2016 bisa dilihat pada tabel 5.3 yang diperoleh sebesar 107,85%. Pada tahun 2017 efektivitas turun pada nilai 93,58% yang berarti mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 14,27%, terjadi penurunan karena pada tahun 2017 target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 103.000.000.000 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp 96.387.712.301 Pada tahun 2018 efektivitas naik pada nilai 104,83% yang berarti mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 11,25%, terjadi penurunan karena pada tahun 2018 target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 104.500.000.000 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami Peningkatan sebesar Rp 109.545.349.134 Pada tahun 2019 kontribusi naik pada nilai 119,63% yang berarti mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 0,12%, terjadi kenaikan karena pada tahun 2019 target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar



Rp 110.000.000.000 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp 131.594.014.690 Pada tahun 2020 efektivitas turun pada nilai 113,47% yang berarti mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 6,16%, terjadi penurunan karena pada tahun 2020 target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 106.000.000.000 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp 120.281.215.017

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kutai Kartanegara pada periode tahun 2016 - 2020 ditinjau dari rasio efektivitas menunjukkan pada nilai rasio yang sangat efektif. Menurut Beni Pekei 2016, standar rasio yang umumnya dipakai sekitar diatas 100%. Nilai efektivitas yang ditunjukkan pada tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan dan penurunan atau bisa dikatakan berfluktuasi, penurunan yang diakibatkan dari mutasi kendaraan bermotor keluar daerah sedangkan kenaikan diakibatkan dari daya beli kendaraan bermotor masyarakat yang meningkat tiap tahunnya hipotesis pertama yang menyatakan bahwa efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kutai Kartanegara pada periode tahun 2016 - 2020 ditinjau dari Rasio efektivitas mengalami pertumbuhan, maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan penelitian ini sejalan dengan Rakatitha (2017) dengan hasil realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali pada tahun 2013-2016 cukup baik karena mencapai target dan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun, sehingga dapat disimpulkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali selama tahun 2013-2016 sudah cukup baik

#### B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Hasil perhitungan efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan asli daerah pada tahun 2016 bisa dilihat pada tabel 5.4 yang diperoleh sebesar 101,65%. Pada tahun 2017 efektivitas naik pada nilai 107,3% yang berarti mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 5,65%, terjadi kenaikan karena pada tahun 2017 target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp 70.000.000.000 Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp 75.110.100.500 Pada tahun 2018 efektivitas naik pada nilai 123,33% yang berarti mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 16,03%, terjadi kenaikan karena pada tahun 2018 target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp 100.000.000.000 Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami Peningkatan sebesar Rp 123.327.851.793 Pada tahun 2019 kontribusi turun pada nilai 112,33% yang berarti mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 11%, terjadi penurunan karena pada tahun 2019 target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp 130.000.000.000 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp 146.034.713.000 Pada tahun 2020 efektivitas naik pada nilai 118,67% yang berarti mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 6,34%, terjadi kenaikan karena pada tahun 2020 Target Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp 93.000.000.000 Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp 110.361.300.000

Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kutai Kartanegara pada periode tahun 2016 - 2020 ditinjau dari rasio efektivitas menunjukkan pada nilai rasio yang sangat efektif. Menurut Beni Pekei 2016, standar rasio yang umumnya dipakai sekitar diatas 100%. Nilai efektivitas yang ditunjukkan pada tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan dan penurunan atau bisa dikatakan berfluktuasi, penurunan yang diakibatkan dari mutasi kendaraan bermotor keluar daerah sedangkan kenaikan diakibatkan dari daya beli kendaraan bermotor masyarakat yang meningkat tiap tahunnya, hipotesis pertama yang

menyatakan bahwa efektifitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kutai Kartanegara pada periode tahun 2016 - 2020 ditinjau dari Rasio efektifitas mengalami pertumbuhan, maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan penelitian ini tidak sejalan dengan Rakatitha (2017) dengan hasil realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali pada tahun 2013-2016 dari penelitian untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami tren penurunan daya beli yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya pada bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), maka diperlukan peran pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi perekonomian yang stabil bagi masyarakat, sehingga dengan demikian perekonomian masyarakat dapat terus bertumbuh dan berkembang ke arah positif, Sehingga penerapan Perda No. 8 Tahun 2016 diharapkan dapat meningkatkan besaran realisasi baik untuk BBNKB I maupun BBNKB II, sehingga akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah Provinsi Bali.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Perhitungan pada Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 s/d 2020 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dapat dikatakan bahwa sangat kurang berkontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Perhitungan pada Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 s/d 2020 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dapat dikatakan bahwa sangat kurang berkontribusi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
3. Perhitungan tingkat efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kutai Kartanegara dari tahun 2016 s/d 2020 berdasarkan hasil perhitungan rata-rata sehingga dapat dikatakan sangat Efektif.
4. Perhitungan tingkat efektifitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kutai Kartanegara dari tahun 2016 s/d 2020 berdasarkan hasil perhitungan rata-rata sehingga dapat dikatakan sangat Efektif.

### **B. Saran**

1. Bagi lembaga Pemerintah  
Sebaiknya UPTD PPRD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kutai Kartanegara perlu memaksimalkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta memperhatikan perencanaan penyusunan target Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, melakukan pendataan ulang jumlah objek pajakserta sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2. Untuk Penelitian Selanjutnya  
Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka penulis menyarankan peneliti selanjutnya agar membuat analisis perbandingan dengan instansi lain atau UPTD Bapenda lainnya yang sejenis, agar hasil rasio yang dihitung dapat dinilai dan dibandingkan baik buruknya bagi Pemerintah.

## **REFERENCES**

Abdul Halim. 2012 *"Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah"*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

- Afandi, P. 2018. *“Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)”*. Riau: Zanafa Publishing.
- Agus, Sartono. 2011. *“Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi”*. Yogyakarta. BPF.
- Anonim, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Aristanti, Widyaningsih. 2011. *“Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map”*. Bandung : CV. Alfabeta
- Djago, Maria Lidya Stephania . 2015. *“Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah periode 2009-2013”*. Surabaya Utara
- Mardiasmo. 2011. *“Perpajakan Edisi Revisi”*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Musthafa. 2017. *“Manajemen Keuangan”*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Ndaparoka, Deasy S.R. 2016. *“Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pajak daerah pada Dinas Pendapatan daerah UPT Kota Kupang”*. Kupang.
- Pekei, Beni. 2016. *“Konsep dan Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi”*. Jakarta : Taushia
- Putra, Windhu. 2018. *“Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah”*. PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Rakatitha, Putri Nadya Kardevi. 2017 *“Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah”*. Bali